

**SKRIPSI**

**DETERMINAN KRIMINALITAS DI INDONESIA DARI  
PENDEKATAN EKONOMI**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*



Oleh :  
**SARI ASRINI**  
13642 / 2009

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2013**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

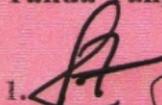
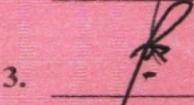
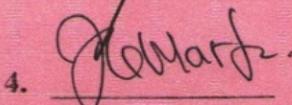
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**DETERMINAN KRIMINALITAS DI INDONESIA DARI PENDEKATAN  
EKONOMI**

**Nama** : SARI ASRINI  
**Bp / Nim** : 2009 / 13642  
**Keahlian** : Perencanaan Pembangunan  
**Program studi** : Ekonomi Pembangunan  
**Fakultas** : Ekonomi

Padang, Agustus 2013

**Tim Penguji :**

NO	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Drs. Alianis MS	1. 
2.	Sekretaris	Muhamad Irfan S.E M.Si	2. 
3.	Anggota	Dr. Hasdi Aimon M.Si	3. 
4.	Anggota	Joan Marta S.E M.Si	4. 

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Determinan Kriminalitas di Indonesia dari Pendekatan Ekonomi*”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Ali Anis M.S dan Bapak Muhammad Irfan, SE, M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Ali Anis M.S, Bapak Muhammad Irfan, SE, M.Si,, Bapak DR. H. Hasdi Aimon, dan Bapak Joan Marta, SE, M.Si selaku Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran-saran beserta masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Ali Anis, M.S selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, dan Ibuk Novya Zulfa Riani, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.

Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.

4. Staf administrasi program studi Ekonomi Pembangunan, Staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan pegawai pustaka yang telah membantu penulis dalam pengurusan surat-surat untuk kelancaran penulisan skripsi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjamkan buku di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan perpustakaan Universitas Negeri Padang.
5. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat beserta Staf yang telah membantu kelancaran bagi penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
6. Teristimewa penulis persembahkan buat Ibunda tercinta dan Ayahanda Tercinta beserta Adik dan Tante yang telah memberikan kesungguhan doa, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2009.
8. Rekan-rekan seperjuangan pada Fakultas Ekonomi khususnya, dan Universitas Negeri Padang pada umumnya.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi. Untuk itu, penulis mohon maaf dan selalu mengharapkan informasi baik saran maupun kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati dan kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Padang, Juli 2013

Penulis  
Sari Asrini

## Abstrak

**Sari Asrini, (2009/13642): Determinan Kriminalitas di Indonesia dari Pendekatan Ekonomi. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di bawah Bimbingan Bapak Drs. Alianis, M.S dan Bapak Muhammad Irfan, SE, M.Si**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, urbanisasi dan upah terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode data panel yaitu kombinasi 31 dari 33 Propinsi di Indonesia dari tahun 2007 sampai 2010, dengan menggunakan 2 indikator kriminalitas yaitu tingkat kriminalitas dan kriminalitas properti. melalui pendekatan *Fixed Effects (FEM) dan Random Effect*. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan induktif. Analisis induktif dalam penelitian ini mencakup (1) Uji Multikolinearitas. (2) Uji Heterokedastisitas. (3) Uji Autokorelasi. (4) Analisis regresi panel. (5) Uji T. (6) Uji F.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kriminalitas dan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kriminalitas properti di Indonesia (2) Urbanisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kriminalitas dan kriminalitas properti di Indonesia (3) Upah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kriminalitas berpengaruh signifikan negatif terhadap kriminalitas properti di Indonesia. Kontribusi secara bersama-sama dari variabel independent yang digunakan terhadap variabel dependent adalah sebesar 13,3 persen tingkat kriminalitas dan 97,2 persen kriminalitas properti.

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan kepada pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia agar tercipta sumber daya yang berkualitas agar dapat menjalankan tujuan pembangunan negara dan menciptakan keamanan, kedamaian dan ketentraman di Indonesia demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci : tingkat kriminalitas, kriminalitas properti, ketimpangan pendapatan (gini), urbanisasi dan upah nominal.**

## DAFTAR ISI

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**KATA PENGANTAR..... i**

**ABSTRAK ..... iii**

**DAFTAR ISI..... iv**

**DAFTAR TABEL ..... viii**

**DAFTAR GRAFIK..... ix**

**DAFTAR LAMPIRAN ..... x**

**DAFTAR GAMBAR .....xi**

**BAB I PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah.....1**

**B. Identifikasi Masalah.....13**

**C. Pembatasan Masalah.....13**

**D. Rumusan Masalah.....13**

**E. Tujuan Penelitian.....13**

**F. Kegunaan Penelitian.....14**

**BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

**A. Kajian Teori.....15**

1. Konsep dan pengertian kriminalitas.....	15
2. Konsep Kriminalitas dari pendekatan ilmu ekonomi.....	17
3. Teori Ekonomi tentang Kriminalitas.....	18
4. Biaya Kriminalitas.....	28
5. Determinan kriminalitas.....	30
a. Pengaruh Ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas.....	30
b. Pengaruh urbanisasi terhadap kriminalitas.....	31
c. Pengaruh upah terhadap kriminalitas.....	34
B. Penelitian Terdahulu.....	36
C. Kerangka Konseptual.....	39
D. Hipotesis.....	41

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Jenis Data.....	43
C. Sumber data.....	43
D. Teknik Pengumpulan data.....	44
E. Definisi Operasional.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	45
1. Analisis deskriptif.....	46
2. Analisis Induktif.....	46
A. Model Regresi Panel.....	46
B. Regresi Panel ( <i>Pooled Analysis</i> ).....	46
1). Pendekatan <i>common effect/non effect</i> .....	47
2). Pendekatan efek tetap ( <i>Fixed Effect/FEM</i> ).....	48
3). Pendekatan efek acak ( <i>Random Effect/REM</i> ).....	48
C. Uji Asumsi Klasik.....	51
1. Multikolinearitas.....	51

2. Autokorelasi.....	52
3. Uji Heteroskedastisitas.....	53
D. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	53
E. Uji Hipotesis.....	54
1. Uji t.....	55
2. Uji F.....	55

## **BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Penelitian.....	56
1. Gambaran umum wilayah penelitian.....	56
a) Letak geografis Indonesia.....	56
b) Penduduk.....	56
c) Iklim dan Sumber daya alam.....	57
2. Analisis deskriptif variabel penelitian.....	58
a) Tingkat Kriminalitas ( Crime rate ).....	58
b) Deskripsi Ketimpangan pendapatan.....	60
c) Deskripsi Urbanisasi.....	62
d) Deskripsi Upah.....	64
3. Analisis Induktif.....	67
3.1.1 Hasil Estimasi Regresi Panel Crime rate...68	
a Analisis model Regresi Panel.....	68
3.1.2 Koefisien Determinasi.....	72
3.1.3 Pengujian Hipotesis.....	73
3.3.1 Hasil Estimasi Regresi Panel	
Tindak Kriminalitas Properti.....	75
a. Analisis model Regresi Panel.....	75
3.3.2 Koefisien Determinasi.....	79

3.2.4 Uji Asumsi Klasik.....	80
3.3.5 Pengujian Hipotesis.....	84
<b>B. Pembahasan.....</b>	<b>86</b>
<b>1. Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap Kriminalitas         di Indonesia.....</b>	<b>87</b>
<b>2. Pengaruh Urbanisasi terhadap Kriminalitas         di Indonesia.....</b>	<b>89</b>
<b>3. Pengaruh Upah terhadap Kriminalitadi Indonesia.....</b>	<b>91</b>
<b>4. Pengaruh ketimpangan pendapatan, urbanisasi dan upah         terhadap kriminalitas di Indonesia.....</b>	<b>94</b>
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
<b>A. Simpulan.....</b>	<b>95</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>96</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Ilustrasi Ekspektasi <i>benefit</i> dan <i>Cost</i> kriminalitas.....	22
2. Daftar Penelitian Terdahulu.....	37
3. Klasifikasi Nilai d (D-W) .....	51
4. Hasil Estimasi Regresi Panel Tingkat Kriminalitas .....	68
5. Hasil Estimasi Regresi Panel KriminalitasProperti .....	76
6. Hasil Uji Multikolinearitas .....	78
7. Hasil Uji Autokorelasi.....	80
8. Hasil Estimasi Uji Heterokedastisitas.....	81

## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1. Jumlah Kasus Kriminal Berdasarkan Kelompok Kejahatan Di Indonesia Tahun 2007-2010.....	6
2. Jumlah Kasus Kriminal berdasra kelompok kejahatan menurut Propinsi di Indonesia Tahun 2007-2010).....	8
3. Tingkat Kriminalitas Menurut Propinsi di Indonesia Tahun 2007-2010 .....	10
4. Tingkat Kriminalitas Menurut Propinsi di Indonesia Tahun 2007-2010 .....	58
5. Rasio gini Menurut Propinsi di Indonesia Tahun 2000-2015 .....	59
6. Angka Urbanisasi Menurut Propinsi di Indonesi Tahun 2000-2015 .....	61
7. Upah nominal Menurut Propinsi Di Indonesia Tahun 2007-2010 .....	63

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
<b>Lampiran 1</b>	
Data Mentah .....	99
<b>Lampiran 2</b>	
Data Diolah .....	102
<b>Lampiran 3</b>	
Hasil Estimasi Chow Test Kriminalitas properti .....	112
Hasil Estimasi Hausman Tes.....	113
Hasil Estimasi Regresi Panel Fixed Effect.....	114
Hasil Uji Multikolinearitas.....	115
Hasil Uji Heterokedastisitas .....	116
Hasil Estimasi Chow Test Tingkat Kriminalitas.....	119
Hasil Estimasi Hausman Test .....	120
Hasil Estimasi Regresi Panel Random Effect .....	121
<b>Lampiran 4</b>	
Tabel T .....	122
Tabel F .....	125

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kurva Marginal Cost of Crime.....	20
2. Kurva Marginal Benefit of Crime.....	21
3. Kerangka konseptual.....	40

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pencapaian kesejahteraan merupakan pencapaian utama dalam kehidupan manusia. Tercapainya kesejahteraan hidup menandakan individu/masyarakat telah berhasil dalam memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan materiil maupun non materiil. Tercapainya kedua kebutuhan tersebut berarti individu/masyarakat dapat dikatakan telah sejahtera hidupnya.

Menurut pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pada dasarnya kebutuhan fundamental manusia terdiri dari kebutuhan materiil dan non materiil. Kebutuhan tersebut berupa kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial. Kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan dan tersier. Sementara untuk kebutuhan sosial berupa status sosial, aktualitas diri dan rasa aman (*security*). Untuk mencapai kesejahteraan hidup, individu/masyarakat tidak hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan biologis saja tapi juga upaya pemenuhan kebutuhan sosial terutama rasa aman dan hak kebebasan. Karena dengan rasa aman yang dimiliki, individu/masyarakat dapat beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan biologis. Selain merupakan kebutuhan sosial, rasa aman (*security*) dan hak kebebasan juga merupakan salah satu bentuk hak asasi yang harus diperoleh oleh setiap individu.

Seiring dengan hal tersebut, pemerintah dan negara wajib memberikan rasa aman bagi seluruh rakyatnya sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 bahwa negara dan pemerintah wajib melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia. Polisi sebagai alat negara wajib menjalankan amanat Undang-Undang dasar untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Oleh sebab itu, kebutuhan akan rasa aman (*security*) bagi individu/masyarakat merupakan salah satu kebutuhan yang utama yang harus diperoleh.

Rasa aman pada dasarnya merupakan variabel yang tidak dapat diukur karena mencakup aspek yang sangat luas termasuk aspek dimensi politik, sosial dan ekonomi. Rasa aman dari aspek politik dan sosial mencakup keamanan dan ketertiban masyarakat di suatu negara. Terciptanya rasa aman dan keamanan di suatu negara akan menciptakan perdamaian dan keseimbangan sosial. Sementara itu, rasa aman dari aspek ekonomi mencakup keamanan, kenyamanan dan kebebasan dalam melakukan aktivitas perekonomian, meliputi rasa aman dalam berproduksi, mengkonsumsi, distribusi dan terutama dalam investasi. Keamanan dalam aktivitas perekonomian akan sangat menentukan hasil yang diperoleh, seperti rasa aman dalam berinvestasi tanpa perlu merasa khawatir akan tindak kriminal yang dapat merugikan investor. Oleh sebab itu, rasa aman dan keamanan itu sendiri sangatlah berpengaruh besar terhadap proses pembangunan.

Dalam proses pembangunan, rasa aman juga merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendorong proses pembangunan tersebut terlaksana sesuai perencanaan yang telah disusun. Semakin aman suatu negara ataupun daerah maka segala bentuk kegiatan pembangunan dapat berjalan lancar, karena apabila suatu negara atau daerah sudah tidak aman dipenuhi dengan tindak kriminal

disertai penduduk yang cenderung berperilaku menyimpang maka segala bentuk pembangunan tidak dapat dilajalakan.

*Global Peace Index* sebagai salah satu organisasi dunia yang mengatur dan mengawasi keamanan setiap negara di dunia, mengelompokkan tingkat keamanan masing-masing negara berdasarkan tingkat kriminalitas dan banyaknya kasus kriminal yang terjadi Negara tersebut. *Global Peace Index* memberikan rentang skor pada setiap negara dengan standar skor <1500-1899, Negara dengan rentang skor tersebut dikategorikan sebagai negara teramanan di dunia yaitu dengan tingkat kriminal yang sangat rendah bahkan tidak ada. Negara tersebut adalah negara–negara Eropa seperti Denmark, Swedia, Slovakia, Jerman, Swiss, Hungaria, di Asia termasuk Singapura , Hongkong, Malaysia, Jepang, Australia dan lainnya. Kemudian negara dengan rentang skor ( standar keamanan dunia ) 1900–2199 maka negara tersebut dapat dikatakan tidak aman dengan tingkat kriminal yang cukup tinggi. Negara adidaya seperti Amerika Serikat termasuk kedalam salah satu negara yang tidak aman dengan angka kriminalitas yang tinggi yaitu dengan rentang skor 2300.

Negara yang mencapai angka > 2200 dapat dikategorikan sebagai negara yang sangat tidak aman dan terparah bahkan berbahaya dengan tingkat kriminal yang sangat tinggi dengan rentang skor mencapai 3100, seperti negara–negara di Afrika dan Amerika Latin. Di Negara ini hukum dan aparatnya sudah tidak mampu mengatasi permasalahan kriminal yang didominasi oleh tindak kerusuhan ,pengrusakan, pemabakaran, pembunuhan, perdagangan obat terlarang, perampokan dan pemberontakan dengan aparat hukum yang sangat sedikit sekali.

Sehingga Negara ini tidak layak dijadikan sebagai tempat tinggal menurut *Global Peace Index* karena sangat berbahaya.

Indonesia sendiri menurut *Global Peace Index* menduduki peringkat ke 63 sebagai salah satu negara yang termasuk dalam kategori tidak aman dengan rentang skor 2100. Hal ini dikarenakan tingkat kriminalitas dan banyaknya kasus kriminal yang terjadi di Indonesia, selain itu jumlah aparat keamanan dan hukum masih jauh tertinggal dibandingkan rasio jumlah penduduk.

Di Indonesia sendiri jumlah aparat kemanan (polisi) dan hukum masih terbilang sedikit yakni sekitar 450.000 personil di seluruh Indonesia. Masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa dengan angka perbandingan 1 : 700 yaitu setiap 1 personil kepolisian melayani/mengawasi 700 orang penduduk sehingga tindak kriminal sangat rentan terjadi . Rasio perbandingan ini tentunya sangat jauh dari efektif dan tidak rasional.

Mengacu pada standar yang ditetapkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yakni dengan rasio 1 : 350, Indonesia dan beberapa negara-negara berkembang lainnya dengan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi sangatlah tidak ideal. Di negara maju seperti Australia, Malaysia, Singapura, Jepang, Amerika dan Eropa memiliki rasio perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah polisi yaitu 1 : 200. Jumlah ini sudah sangat ideal melebihi standar yang ditetapkan oleh PBB. Maka dari itu negara ini dapat dikatakan sebagai salah satu negara termanan di dunia.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang cenderung dengan jumlah masyarakat miskin yang cukup tinggi. Sehingga masyarakat miskin selalu diidentikkan dengan kejahatan akibat dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dan juga sangat dekat dengan tindak amoral akibat dari kurangnya atau bahkan minim pendidikan yang menyebabkan individu/masyarakat tersebut melakukan tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ditambah lagi dengan timbulnya kelangkaan sumber daya. Masyarakat berlomba – lomba untuk memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan ekonomi seperti terus meningkatkan produksi di berbagai sektor tanpa memperhitungkan ketimpangan yang akan terjadi apabila sumber daya terus dieksploitasi oleh individu /masyarakat yang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya.

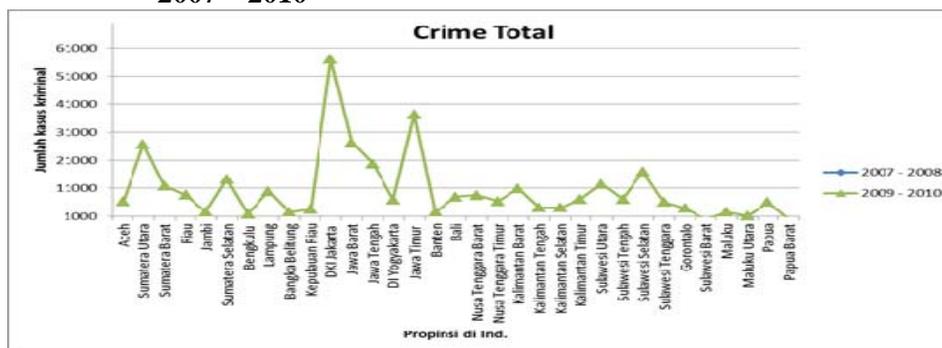
Akibatnya timbul ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan yang akhirnya juga akan berujung pada tindak kriminal oleh pihak–pihak yang dirugikan terutama masyarakat miskin yang minim pendidikan dengan beban ketergantungan yang tinggi.

Tingginya beban ketergantungan di dalam masyarakat miskin tersebut ,tanpa didukung oleh tingkat pendapatan yang mencukupi akan menimbulkan penyimpangan–penyimpangan dalam berperilaku. Sebagian masyarakat menjadi pengangguran. Masyarakat menjadi tidak mampu lagi berpikir secara rasional dan positif dalam pemenuhan kebutuhan karena moral yang semakin hari semakin menurun. Akibatnya penyimpangan tidak dapat terelakkan. Permasalahan–permasalahan tersebut menyebabkan masyarakat yang tergolong miskin mencari jalan pintas untuk untuk memenuhi kebutuhan, seperti melakukan tindak

pencurian, perampokkan dan perampasan harta benda. Mereka tidak lagi memikirkan akibat- akibat dari tindakan kriminal tersebut yang dapat merugikan dirinya sendiri demi memenuhi kebutuhan. Oleh sebab itu, angka kriminalitas menjadi terus meningkat diiringi dengan tindak kejahatan yang tinggi. Jumlah kasus kriminal meningkat pada tahun 2007, dan mengalami penurunan tahun 2008 dan 2009. Namun pada tahun 2010 jumlah kasus kriminal cenderung meningkat dari tahun sebelumnya dengan angka yang cukup tinggi.

Jumlah tertinggi berada pada ibu kota DKI Jakarta yang mencapai angka 70.989 kasus kriminal. Angka tersebut terbilang cukup tinggi karena melebihi jumlah kasus kriminal di propinsi lainnya di Indonesia. Diikuti oleh propinsi Jawa Timur dengan jumlah kasus kriminal mencapai 43.882 kasus. Jawa Barat juga termasuk kedalam propinsi dengan jumlah kasus kriminal tertinggi dibanding propinsi lain di Indonesia yaitu dengan jumlah 22.160 kasus kriminal terlihat pada garfik berikut ini :

**Grafik. 1 Jumlah kasus kriminal ( Crime Total ) propinsi di Indonesia 2007 – 2010**



Sumber : Badan Pusat Statistik , Statistik Kriminal 2011

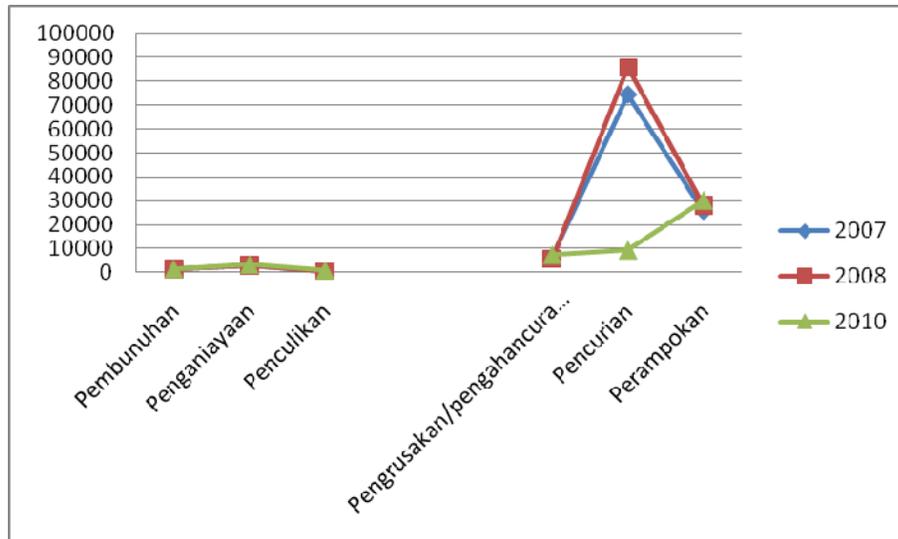
Tingginya jumlah penduduk menyebabkan tingkat kemiskinan yang semakin parah akibat beban ketergantungan yang tinggi di dalam keluarga dan masyarakat. Belum lagi pendapatan yang tidak sebanding dengan kebutuhan yang akhirnya menuntut individu untuk melakukan tindak kriminal demi memenuhi kebutuhan.

Kepadatan populasi yang tinggi, menyebabkan timbulnya kemiskinan yang tinggi di dalam masyarakat. Masyarakat tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan dengan tanggungan beban ketergantungan yang tinggi sehingga masyarakat /individu tersebut tergolong kepada masyarakat miskin.

Rata – rata penduduk Indonesia masih tergolong miskin. Dengan kata lain penduduk Indonesia belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya untuk mencapai taraf kesejahteraan hidup. Jumlah penduduk miskin tertinggi berada pada Propinsi Jawa Barat dengan jumlah 5.457.900 jiwa pada tahun 2007 dan mencapai angka 10.684.800 jiwa.

Akibat dari kemiskinan yang tergolong tinggi tersebut menyebabkan masyarakat yang terbilang miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan disertai pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan bahkan memaksa individu untuk melakukan tindak kriminal seperti pencurian, perampokan bahkan pembunuhan. Seperti terlihat pada grafik jumlah kasus kriminal berdasarkan kelompok kejahatan yang ditampilkan oleh grafik 2 dibawah ini :

**Grafik.2 Jumlah Kasus kriminal berdasarkan kelompok  
Kejahatan tahun 2007 - 2010**



Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2011

Pada grafik diatas terlihat bahwa tindak kriminal properti lebih tinggi dibanding dengan jumlah kejahatan atas fisik manusia dalam rentang waktu 2008-2010. Selain faktor tersebut diatas, faktor lain yang juga mempengaruhi perilaku menyimpang seperti kriminalitas adalah rata – rata tingkat upah. Besar kecilnya upah yang diterima mencerminkan seberapa besar pendapatan yang diterima yang nantinya juga akan menentukan seberapa besar suatu keluarga/masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya.

Di Indonesia, tingkat upah yang diterima oleh tenaga kerja pada setiap propinsi berbeda – beda sesuai dengan pendapatan daerah di wilayah tersebut. Upah tertinggi yang diterima oleh tenaga kerja setiap bulannya terdapat pada propinsi Papua dan Papua barat dengan upah per bulan yan diterima oleh buruh adalah berkisar 987.000 pada tahun 2007. Pada tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011

upah tenaga kerja terus meningkat hingga mencapai angka 1.410.000. lebih tingginya upah yang diterima tenaga kerja yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pada propinsi Papua dan Papua Barat menunjukkan pendapatan daerah di wilayah tersebut lebih tinggi daripada wilayah lainnya di Indonesia.

Namun, angka tersebut tidak menjamin kesejahteraan tenaga kerja di daerah tersebut. Terbukti dengan mayoritas penduduk di Papua cenderung primitive dan minim pendidikan lebih banyak mendiami daerah – daerah pedesaan yang terpencil. Hanya sedikit penduduk yang tinggal di daerah perkotaan yang menikmati upah yang ditetapkan pemerintah daerah. Sehingga menyebabkan rata – rata penduduk propinsi Papua dapat dikatakan belum sejahtera dan cenderung kepada masyarakat yang tergolong miskin.

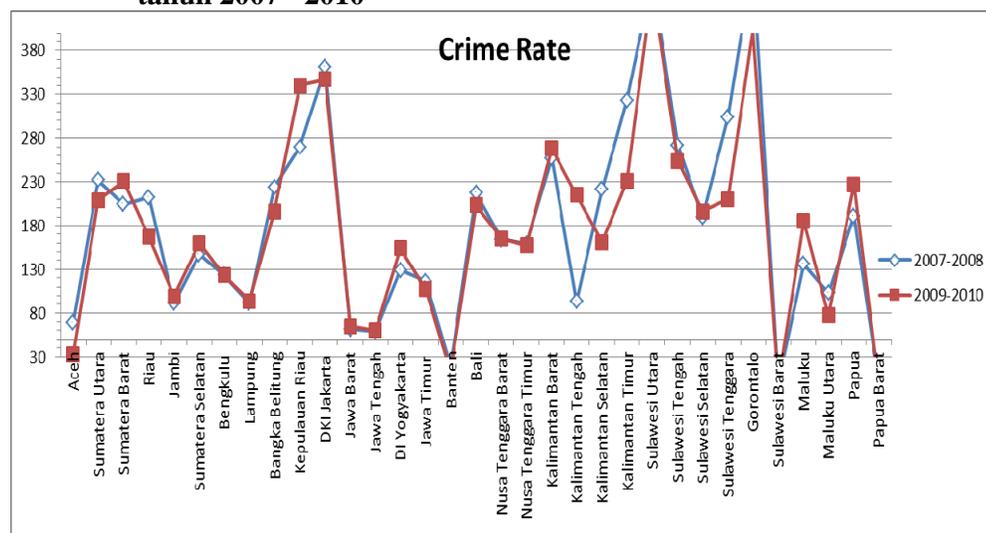
Sebaliknya di daerah lain seperti kota besar DKI Jakarta dengan upah minimum 900.000 – 1.290.000 dari tahun 2007–2011 yang terbilang lebih rendah dibanding propinsi Papua justru menjadi daerah tujuan kerja bagi sebagian masyarakat yang berada di daerah terpencil. Dibandingkan daerah lain seperti Jawa barat, Nusa Tenggara, Maluku dan propinsi – propinsi di Sumatera , upah tenaga kerja DKI Jakarta memang lebih tinggi. Oleh karena itu , masyarakat di daerah dengan tingkat upah yang rendah lebih memilih untuk bermigrasi ke DKI Jakarta dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan.

Dengan kata lain sudah terjadi ketimpangan pendapatan di beberapa daerah di Indonesia. Namun, perpindahan tenaga kerja ke daerah dengan upah tinggi justru menimbulkan permasalahan baru yaitu kemiskinan. DKI Jakarta tidak lagi mampu untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Sehingga lapangan

perkerjaan menjadi semakin sempit akibatnya justru menimbulkan pengangguran, gelandangan dan pengemis yang akhirnya menyebabkan ketimpangan yang semakin tinggi dan kemiskinan yang tidak dapat terelakkan. Permasalahan tersebut justru menimbulkan tindak kejahatan dengan motif ekonomi karena tidak mampu dan tidak memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat perkotaan seperti DKI Jakarta berisiko lebih tinggi terkena perilaku kriminal seperti perampokan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya dibanding daerah lain akibat kepadatan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Selain itu angka kemiskinan dan pengangguran juga merupakan permasalahan yang tak terselesaikan. Sehingga menyebabkan penduduk di daerah tersebut lebih berisiko terkena tindak kejahatan. Terlihat pada grafik 3 berikut ini :

**Grafik. 3 Tingkat Kriminalitas (*Crime Rate*) menurut propinsi di Indonesia tahun 2007 - 2010**



Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik kriminal 2011

Fenomena tersebut dapat dikatakan dilatar belakangi oleh rendahnya mutu sumber daya manusia akibat mutu pendidikan yang tergolong rendah. Rendahnya mutu sumber daya manusia menyebabkan tenaga kerja yang dihasilkan sedikit sekali yang berkualitas yang dapat bersaing di pasar global tenaga kerja. Sehingga mengakibatkan rendahnya produktivitas kerja yang dapat mempengaruhi hasil produksi.

Rendahnya pendidikan yang dialami oleh sebagian penduduk di negara Berkembang menyebabkan moral yang rendah sehingga sangat mudah sekali untuk terjerumus ke dalam tindak kriminal tanpa dapat berpikir secara rasional. Ditambah lagi dengan beban ketergantungan yang tinggi dan pendidikan rendah secara langsung mempengaruhi tingkat pendapatan yang rendah sehingga identik dengan kemiskinan. Kemiskinan sangat dekat dengan tindak kriminal.

Selanjutnya, perekonomian daerah pada setiap propinsi serta aktivitas ekonomi berbagai sektor dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Semakin baik perekonomian suatu daerah maka semakin maju kegiatan ekonomi suatu daerah sehingga kesejahteraan penduduk juga akan meningkat. Peningkatan kesejahteraan penduduk berarti ketimpangan akan berkurang sehingga resiko perilaku tindakan kriminal juga akan semakin menurun. Dan sebaliknya saat penerimaan perekonomian suatu daerah semakin menurun hal ini mengindikasikan segala sektor ekonomi di daerah tersebut mengalami kemunduran sehingga kesejahteraan yang juga semakin menurun dan mengakibatkan resiko tindak kriminal akan semakin tinggi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi tingkat upah yang diterima oleh masyarakat. Tingginya pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi pembangunan daerah yang cenderung lebih terpusat pada kota besar dapat menimbulkan ketimpangan pembangunan wilayah dan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan menyebabkan masyarakat pedesaan menggantungkan harapan di kota besar. Mereka memilih melakukan migrasi atau urbanisasi untuk merasakan hasil pembangunan di kota besar.

Persentase tertinggi jumlah urban yang masuk ke suatu daerah terdapat pada DKI Jakarta yaitu mencapai angka 100 %. Hal ini mengindikasikan kota Jakarta menjadi destinasi utama bagi para urban untuk melakukan urbanisasi. Berikutnya yang juga menjadi daerah tujuan bagi para migran adalah Kalimantan. Kalimantan sebagai salah satu daerah dengan pendapatan asli daerahnya yang cukup tinggi dan sumber daya alam yang berlimpah sehingga hal tersebut dianggap menjanjikan bagi para migran untuk merubah hidup.

Hal tersebut menyebabkan daerah di Kalimantan terutama Kalimantan timur memiliki tingkat kriminalitas yang cukup tinggi ditandai dengan resiko penduduk terkena tindak kriminal cukup tinggi di daerah tersebut yang meliputi kejahatan properti dan kejahatan fisik.

Berdasarkan fenomena – fenomena tersebut diatas , maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan daerah penelitian Indonesia dengan judul

**“Determinan kriminalitas di Indonesia dari pendekatan ekonomi”.**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Indonesia
2. Pengaruh urbanisasi terhadap kriminalitas di Indonesia
3. Pengaruh upah nominal terhadap kriminalitas di Indonesia
4. Pengaruh ketimpangan, urbanisasi dan upah nominal secara bersama-sama terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia

## **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian dibatasi pada ketimpangan pendapatan, urbanisasi dan upah nominal sebagai variabel independent dan kriminalitas dengan indikator tingkat kriminalitas dan kriminalitas properti sebagai variabel dependent.

## **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah yaitu :

1. Seauhmana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Indonesia?
2. Seauhmana pengaruh urbanisasi terhadap kriminalitas di Indonesia?
3. Seauhmana pengaruh upah nominal terhadap kriminalitas di Indonesia?
4. Seauhmana pengaruh ketimpangan, urbanisasi dan upah nominal secara bersama - sama terhadap kriminalitas di Indonesia?

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Indonesia
2. Pengaruh urbanisasi terhadap kriminalitas di Indonesia

3. Pengaruh upah nominal terhadap kriminalitas di Indonesia

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan penelitian ini berguna bagi :

1. Pengembangan ilmu ekonomi kriminalitas ( *Economics crime* ).
2. Pengembangan penelitian terdahulu.
3. Pengambil kebijakan Badan Perencanaan Nasional dan Aparatur Hukum.
4. Mahasiswa untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

## **BAB II**

### **KERANGKA KONSEPTUAL , KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Konsep dan Pengertian Kriminalitas**

Istilah kriminal atau kejahatan mempunyai pengertian secara yuridis-formal dan sosiologis (Kartini Kartono,1992). Secara yuridisformal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial sifatnya, dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat.

Secara umum, menurut Reksohadiprojo dan Karseno (1985), ada empat kelompok kejahatan. *Pertama* adalah kelompok kejahatan terhadap hak milik seperti perampokan, pencurian, pembegalan, pembakaran yang disengaja, dan penggelapan. *Kedua* adalah kelompok kejahatan terhadap hak pribadi seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan. *Ketiga* adalah kelompok perilaku yang negatif menurut pandangan masyarakat seperti perjudian, pelacuran, dan narkoba. Kemudian yang *keempat* adalah kelompok pelanggaran seperti kerusuhan, dan pelanggaran lalu-lintas. Perbuatan yang mengarah kepada tindakan kriminal atau kejahatan tidak dengan sendirinya muncul. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan tersebut.

Kejahatan pada hakekatnya timbul karena karakter manusia yang melakukan kejahatan, kemiskinan, kesempatan kerja, dan faktor lain yang membuka peluang seseorang untuk berbuat jahat seperti sedikitnya patroli polisi, keadaan jalan & lingkungan, kepadatan penduduk, nilai harta penduduk, frekuensi ronda, dan efektivitas lembaga kejaksaan & kehakiman (Reksohadiprodjo dan Karseno,lgBS). Pendapat lain mengemukakan bahwa faktor personal, faktor sosial, dan faktor situasional dapat menyebabkan munculnya kejahatan (Separovic, 1985).

Faktor personal mencakup faktor biologis (umur, jenis kelamin, mental, dan lain-lain), dan faktor psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan). Faktor sosial terkait dengan faktor imigran, minoritas, dan pekerjaan. Kemudian faktor situasional antara lain situasi konflik, tempat, dan waktu. Bagi Sharp, et.al.(1996), “faktor utama yang cenderung menimbulkan perilaku kriminal adalah nafsu dan emosi yang tidak terkendali, kemiskinan, dan rendahnya standar nilai-nilai social masyarakat“. Tentunya masih ada faktor lain yang juga dapat menjadi pemicu munculnya tindakan kriminal.

Sementara itu, ilmu kriminologi memandang konsep kejahatan berbeda dengan konsep kejahatan dalam hukum. Dalam kriminologi orang disebut penjahat jika pola tingkah laku kejahatan yang bersifat menetap. Tindakan kejahatan yang dilakukan merupakan karakter dari orang tersebut. Sifat dan tingkah laku yang menetap artinya sifat dan tingkah laku tersebut sudah menjadi karakter pelaku dan pola tingkah laku yang dilakukan berulang – ulang. Sehingga ilmu kriminologi berfokus pada gejala kejahatan dengan memperhatikan

kebiasaan perbuatan jahat tersebut dan melandaskan diri pada ilmu sosiologi , hukum dan psikologi sehingga sedapat mungkin analisis pendekatan yang dilakukan dapat lebih komprehensif menjelaskan fenomena sosial yang terjadi.

## **2. Konsep Kriminalitas dari Pendekatan Ilmu Ekonomi**

“Ilmu ekonomi memandang kejahatan sebagai fenomena yang harus diberantas disebabkan dampaknya yang menimbulkan banyak biaya baik secara materil maupun non materil. Sedangkan kerangka ekonomi merupakan salah satu pendekatan yang tepat untuk mengoptimalkan sumber daya dalam memberantasnya” (Becker, 1986). Dalam penerapannya, analisis ekonomi kejahatan lebih banyak menggunakan data kejahatan properti yaitu kejahatan atas harta benda, antara lain pencurian ,perampokan, pembobolan rumah dan lain-lain.

Tingkat kriminalitas adalah sejumlah tindak kriminal yang dilaporkan per 100.000 penduduk yang dikelompokkan dalam kejahatan properti dan kejahatan dalam bentuk kekerasan fisik saat marginal benefit lebih tinggi dari marginal cost.

Dalam ilmu ekonomi, kriminalitas dikategorikan dalam lima kelompok kategori, yaitu :

1. *Persons* ( Perorangan ) terdiri atas pembunuhan, penculikan, pemerkosaan dan pembunuhan terencana.
2. *Property* terdiri atas pencurian, perampokan, penjarahan disertai pengrusakan dan penipuan.
3. *States* ( Negara ) terdiri atas pengkhiatan bangsa, terorisme, pencurian pajak, ilegalisme dan lainnya.
4. *Rent-seekers* ( mencari keuntungan berlebih ) termasuk monopoly.
5. *One Selfs* terdiri atas propstitusi, konsumsi narkotika dan obat terlarang dan lainnya.

Menurut Gorr, Olligschlaeger and Thompson (2003) dalam Mary Edward (2010) mengemukakan bahwa “ kriminalitas terutama kejahatan property terjadi pada musim-musim tertentu seperti musim salju (Natal), musim gugur dan musim liburan. Hal ini disebabkan oleh pada musim ini kemungkinan untuk tertangkap sangat rendah akibat individu dan masyarakat sangat sibuk dengan berbagai aktivitas sehingga para pelaku criminal dapat leluasa untuk melakukan aksi kriminalitas di tengah masyarakat “.

Sementara itu, menurut Felson and Poulsen ( 2003 ) dalam Mary Edward (2010) menyatakan bahwa “ kriminalitas dapat terjadi setiap waktu namun perkiraan rentang waktu terjadinya tindak kriminal tertinggi adalah saat pagi hari sampai sore ( jam kerja ) dan menurun saat malam hari samapai tengah malam”.

### **3. Teori Ekonomi Kriminalitas**

Tindak kriminalitas yang terjadi di masyarakat sering kali berfokus pada perilaku individu/kelompok yang bertindak amoral seperti pada penjelasan secara hukum dan psikologis yang menyatakan bahwa seseorang dengan perilaku amoral yang menjurus pada kejahatan memiliki dampak sosial yang buruk terhadap lingkungan yang dapat mempengaruhi individu lainnya sehingga para pelaku kejahatan /individu dengan sifat amoral tersebut dipandang sebagai permasalahan yang harus diberantas.

Namun pandangan tersebut sering kali hanya melihat dari satu sudut pandang yaitu para pelaku kejahatan dengan sifat amoral yang harus dibenahi

tanpa memperhatikan alasan–alasan rasional yang menyebabkan perilaku tersebut berkembang di masyarakat.

Berdasarkan pandangan hukum, sosial dan psikologis tersebut, Ilmu ekonomi sebagai salah satu ilmu yang dapat menjelaskan penyebab dari perilaku amoral yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang makro yang dapat beriringan dengan pandangan social, hukum dan psikologis dan bahkan dapat melengkapi pandangan tersebut. Ilmu ekonomi mampu menjelaskan sebab akibat dari perilaku amoral tersebut yang berujung pada tindak kriminal.

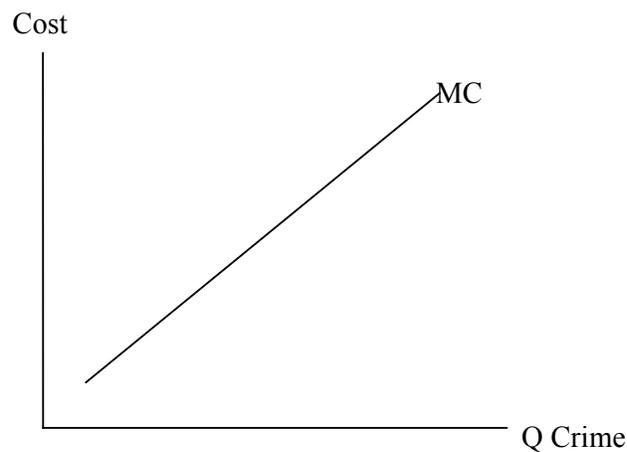
Gary S. Becker sebagai salah satu pemikir ekonomi yang pertama kali mengungkapkan bahwa ilmu ekonomi mampu menjelaskan sebab akibat yang menyertai tindak kriminalitas yang sering terjadi di masyarakat.

Becker (1968) mengatakan bahwa “ dalam ilmu ekonomi manusia atau beberapa individu yang melakukan tindakan kriminal cenderung disebabkan oleh faktor finansial untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dan cepat dibandingkan dengan melakukan pekerjaan legal atau berkeja pada sektor formal tanpa mempertimbangkan kerugian–kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut”.

Becker (1968) mengemukakan *Rational Choice Teory* yang mengatakan “ individu memilih dan melakukan tindak kriminalitas saat marginal benefit yang diperoleh lebih tinggi daripada marginal cost yang dikeluarkan. Individu menjadi kriminal bukan karena motivasi dasar yang berbeda tapi karena benefit dan cost yang berbeda”. Dimana  $\text{Marginal Benefit} \neq \text{Marginal Cost}$ . Saat  $\text{MB} >$

MC maka Crime ( Kriminalitas ) akan meningkat, saat  $MB < MC$  maka Crime ( Kriminalitas ) akan menurun.

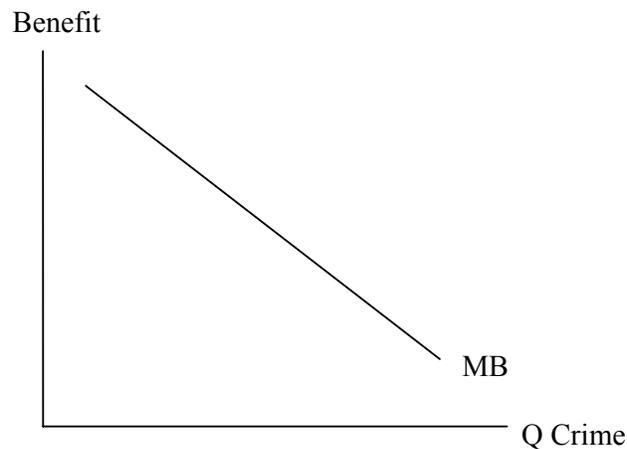
Marginal benefit dan Marginal cost memiliki slope kurva yang berbeda seperti ditunjukkan oleh kurva berikut ini yang dilihat dari sudut pandang pelaku kriminal :



**Gambar 1. Kurva Marginal Cost of Crime**

Marginal Cost seperti yang ditunjukkan pada kurva diatas menunjukkan bahwa setiap tindak kriminalitas yang dilakukan oleh pelaku memiliki cost (biaya) yang dikeluarkan. Semakin tinggi biaya dalam kriminalitas maka akan mengurangi tindak kriminalitas di masyarakat. Dimana setiap penambahan 1 biaya akan mengurangi tindak kriminalitas. Artinya setiap tindak kriminal yang dilakukan akan dikeluarkan sejumlah biaya (cost) dalam bentuk sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimaksud adalah berupa keuntungan dalam tindak kriminal ( sejumlah uang hasil rampokan), probabilitas hukuman, lama hukuman jika tertangkap dan penghasilan per tahun yang dihasilkan (jika memiliki

pekerjaan tetap). Opportunity cost yang dikeluarkan adalah semua penghasilan per tahunnya yang hilang saat menjalani hukuman, Ehrlich ( 1970 ).



**Gambar 2. Kurva Marginal Benefit of Crime**

Selain Marginal Cost, para pelaku kriminal juga memiliki kurva Marginal Benefit yakni sejumlah keuntungan yang diterima oleh pelaku saat melakukan kriminalitas. Dari kurva diatas terlihat bahwa semakin tinggi benefit akan meningkatkan Q kriminalitas. Setiap Pelaku kriminal akan memaksimalkan net benefit yang diperoleh dari kriminalitas. net benefit diperoleh saat  $\text{Benefit} - \text{Cost}$  memperoleh hasil yang positif. Jika net benefit yang diperoleh negatif maka individu akan memilih untuk tidak melakukan kriminalitas.

Diilustrasikan dengan membandingkan contoh kasus 2 orang pelaku kriminal (Tarcy dan Pat). Dimana masing-masing pelaku tersebut akan memperoleh benefit dari kriminalitas properti (perampokan) sebesar 10.000, sementara probabilitas dihukum juga sama yakni 0,30 dengan ekspektasi lama dihukum masing-masing 2 tahun. Disamping itu kedua pelaku tersebut juga

memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan sebesar 30.000 dan 10.000 per tahunnya. Sementara itu, ekspektasi biaya yang dikeluarkan dalam tindak kriminalitas perampokan adalah 18.000

( benefit x probabilitas x penghasilan) dengan net benefit yang diperoleh sebesar -8.000 dan +4.000 melalui perhitungan benefit – cost. Seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel. 1 Ilustrasi Ekspektasi *benefit* dan *Cost* kriminalitas**

	Tracy	Pat
Expektasi benefit	10.000	10.000
a. Probabilitas dihukum	0,30	0,30
b. Ekspektasi lama dihukum	2 tahun	2 tahun
c. Penghasilan tetap/tahun	30.000	10.000
Expektasi cost ( axbxc )	18.000	6.000
Net benefit ( benefit - cost)	-8.000	4.000

Opportunity cost yang dari tindak kriminal tersebut adalah sebesar 60.000 untuk Tracy dan 20.000 untuk Pat dalam 2 tahun. Opportunity cost diperoleh dari penghasilan yang hilang/dikorbankan selama menjalani hukuman ( 30.000 x 2 tahun ).

Dari penghitungan Marginal benefit dan Marginal cost diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa net benefit yang diperoleh oleh masing-masing pelaku adalah berbeda, dimana Pat memperoleh net benefit dari tindak kriminal tersebut sementara itu Tracy justru tidak memperoleh keuntungan akibat opportunity yang dikeluarkan selama menjalani hukuman jauh lebih besar daripada benefit yang diperoleh.

Berdasarkan *Rational Choice Theory* dimana seorang individu memutuskan untuk bertindak kriminal saat Marginal Benefit yang diperoleh lebih tinggi daripada Marginal cost yang dikeluarkan. Sehingga secara rasional Tracy memilih untuk tidak melakukan tindak kriminal. Karena Marginal benefit yang diperoleh jauh lebih rendah dengan biaya yang dikeluarkan jauh lebih tinggi dari manfaat yang diperoleh sehingga dalam kasus ini pelaku kriminal memutuskan untuk tidak melakukan tindak kriminal perampokan.

Teori Becker tersebut didukung oleh teori ekonomi kriminalitas lainnya yaitu *Deterrence Theory* oleh Jeremy Bentham ( 1789) yang merupakan dasar dari ilmu ekonomi kriminalitas yang mengacu pada *Rational Choice Theory*. Teori ini menjelaskan kriminalitas dalam beberapa pendekatan, yakni Kriminalitas dalam pendekatan Sosial, Kriminalitas dalam pendekatan Biologi dan Kriminalitas dalam pendekatan Psikologi.

Kriminal dalam Pendekatan sosial didukung oleh beberapa teori pendukung diantaranya *Theory of relatives deprivation* oleh Davis (1959), *Strain theory* yang dikemukakan oleh Agnew's (1983) serta teori oleh Shaw and Mckay's ( 1942 ) *social disorganization theory* yang pada dasarnya menjelaskan masalah-masalah sosial di masyarakat yakni ketimpangan pendapatan ( *income inequality* ).

Menurut *Theory of relatives deprivation* “masyarakat miskin merasa terjadi ketimpangan, dimana mereka cenderung merasa terdapat perbedaan antara perumahan, posisi dan masalah keamanan yang dibeda-bedakan dibandingkan dengan kesejahteraan yang diterima oleh masyarakat kaya. Keadaan ini

menyebabkan mereka merasa iri dan mendapat ketidakadilan sehingga mereka memilih untuk melakukan kriminalitas”.

Tidak jauh berbeda dengan teori diatas, *Strain theory* yang dikemukakan oleh Agnew's (1983) juga mengungkapkan bahwa “ketidakberhasilan dan kegagalan di dalam hidup setiap individu menyebabkan mereka cenderung untuk memilih kriminalitas sebagai jalan pintas”. Mengacu pada *Rational Choice teory*, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan semata-mata menunjukkan perbedaan net benefit yang diperoleh dalam melakukan kriminalitas. Para pemikir ekonomi memprediksi bahwa kriminalitas yang tinggi berasal dari masyarakat dengan kalangan pendapatan yang rendah karena tingkat pengembalian (*rate of return*) yang diterima juga rendah.

Sedangkan menurut *social disorganization theory* oleh Shaw and Mckay's (1942) mengatakan bahwa “kriminalitas terjadi saat mekanisme control sosial di masyarakat sangat lemah dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial diantaranya kemiskinan, ras, mobilitas penduduk (migrasi/urbanisasi) dan ketidakstabilan dalam keluarga. Ketimpangan dikatakan sangat erat kaitannya dengan kriminalitas karena ketimpangan juga berkaitan erat dengan kemiskinan. Kemiskinan sangat rentan dengan kriminalitas”.

Secara empiris, kepadatan penduduk dan mobilitas penduduk yang tinggi juga merupakan faktor yang mempengaruhi tindak kriminalitas. Tingkat kriminalitas tertinggi per 100.000 penduduk cenderung terjadi di daerah perkotaan dibanding pedesaan. Hal ini disebabkan oleh daerah pedesaan dengan jumlah penduduk yang sedikit sehingga akan sangat mudah untuk dikenali dengan

peluang tertangkap yang tinggi. Sedangkan daerah perkotaan dengan penduduk yang padat menyebabkan peluang untuk dikenali dan peluang tertangkap cukup rendah sehingga angka kriminalitas lebih tinggi di perkotaan.

Sementara itu ilmu biologi (*Biology and Crime*) memandang sebagai salah satu faktor turunan yang diwarisi secara genetik pada setiap generasi. Menurut Cesare Lombroso (1836-1909) mengatakan bahwa kriminalitas terjadi akibat adanya evolusi". Cesare Lombroso mengungkapkan dimana seorang kriminal dapat dikenali melalui bentuk dan struktur tubuhnya disertai kepribadian yang agresif. Namun, teori ini tidak dapat dijadikan sebagai acuan karena teori ini cenderung menganalisa watak seseorang secara biologi namun tidak dapat digunakan untuk menganalisa apakah seseorang adalah pelaku kriminal atau bukan.

Hampir sama dengan *Sociological of crime*, *Psychological of crime* menggunakan fenomena sosial dalam menganalisa kriminalitas di masyarakat. Rincinya, *Psychological of crime* mengungkapkan faktor lingkungan internal (keluarga, individu dengan individu lainnya) ataupun eksternal (sosial) dapat mempengaruhi mental seseorang sehingga menyebabkan individu tersebut memilih untuk melakukan tindak kriminalitas.

Yochelson and Stanton E. Samenow (1976-1984) dalam studinya yaitu *mentally ill criminals* mengungkapkan bahwa "kriminal yang dilakukan oleh seseorang dengan masalah mental tidak jauh berbeda dengan kriminalitas yang terjadi umumnya, namun untuk kasus ini individu dengan masalah mental yang melakukan kriminalitas tidak dijatuhi hukuman penjara pada umumnya".

Selain itu, teori tersebut diatas juga didukung oleh Para ahli ekonomi klasik seperti Robert Malthus dengan Pendekatan Neo Malthusian dalam Neo Malthusian ( 1798 ), “ laju populasi yang tinggi dengan jumlah penduduk yang tinggi menjadi penyebab utama dari timbulnya tindak kriminal di masyarakat. Teori ini didasari dengan dua asumsi tetap yaitu makanan dan keinginan yang tinggi untuk memperoleh eksistensi di tengah masyarakat (*foods and passion for human existence*) “. Malthus percaya bahwa tingginya laju pertumbuhan penduduk akan lebih cepat daripada pertumbuhan supply makanan yang nantinya akan menimbulkan kelangkaan sumber daya. Kelangkaan dengan sendirinya akan menimbulkan ketimpangan yang berujung pada kemiskinan. Hasilnya , individu menjadi tidak sejahtera sementara kebutuhan terus bertambah seiring dengan tingginya beban ketergantungan. Keadaan ini akan mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tanpa berpikir rasional. Sehingga tindak kriminal mulai terjadi di masyarakat. Seperti pencurian , perampokan ,penipuan bahkan pembunuhan.

Plato dalam Ihdal ( 2007 ) mengatakan bahwa “kemiskinan dan kekayaan adalah sumber dari malapetaka yang akan menimbulkan keinginan manusia untuk melakukan kejahatan. Oleh sebab itu , Plato menganjurkan agar tidak ada ketimpangan yang tinggi antara yang kaya dengan yang miskin”. Thomas Van Aquino pada abad pertengahan juga mengungkapkan adanya hubungan sebab akibat yang kuat antara kemiskinan dengan kejahatan. G. Von Mayr (dalam Neo Malthussian) menunjukkan bahwa ”peningkatan harga gandum sejalan dengan naik turunnya jumlah migrasi dan sejalan juga dengan naik turunnya kejahatan

properti dan pengemis. Sedangkan naik turunnya upah memiliki hubungan yang sebaliknya”.

Henry George dan Karl Max dalam Ihdal ( 2007 ) menyebutkan “adanya kegagalan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berakibat pada tindakan kejahatan. Analisis kejahatan dengan pendekatan ekonomi menggunakan asumsi dasar bahwa individu membuat keputusan berdasarkan pemikiran yang rasional tanpa mempertimbangkan benar atau salahnya suatu hal yang menjadi landasan hanyalah untung dan rugi yang ia dapatkan dari pengambilan keputusan. Keputusan melakukan tindak kejahatan adalah keputusan rasional berdasarkan maximisasi kepuasan”.

Hasil studi secara teoritical dan empiris ilmu ekonomi menyebutkan bahwa ekonomi memasukan 3 tipe kondisi yang menyebabkan tindak kriminal terjadi, diantaranya rata – rata pendapatan , pola distribusi pendapatan dan level pendidikan individu.

Fleisher ( 1966 ) dalam *World Bank and Latin America Studies* mengatakan bahwa “individu memutuskan untuk melakukan tindak kriminal akibat tingkat pendapatan yang rendah sehingga menyebabkan tendensi untuk melakukan tindak kriminal menjadi meningkat”.

Ehrlich dalam *World Bank and Latin America Studies* (1972; 538), mangatakan bahwa “efek balik dari kriminalitas terutama kejahatan properti berdasarkan peluang yang diciptakan oleh korban yang potensial atas tindak kriminal , diukur dari tingkat pendapatan (seperti pendapatan menengah keatas)

yang diperoleh sekelompok individu yang membuat individu- individu tersebut menjadi berpotensi sebagai korban kejahatan”.

Glaeser and Scheinkman (1996) dalam *World Bank and Latin America Studies* (1998: 6) mengatakan “interaksi sosial merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak kriminalitas”. Menurutnya, interaksi sosial diantara individu dapat menyebabkan transfer atau perpindahan perilaku amoral kepada individu lainnya dari individu dengan perilaku negatif, selain itu pengalaman menjadi korban tindak kriminal dapat meningkatkan peluang untuk melakukan tindak kriminal.

Edward Ehlgar (2006 : 101) dalam *Economics Uncut – Economics crime ( Guns and Roses )* mengatakan bahwa “ faktor lain yang menyebabkan terjadinya tindak kriminalitas selain adalah teknologi. Teknologi membuka peluang bagi pelaku kriminal untuk melancarkan tindak kriminal seperti pembajakan kartu kredit, pembobolan sistem sekuritas keuangan perbankan, penipuan, pornografi, *drugs trafficking* dan lain sebagainya”.

#### **4. Biaya Kriminalitas**

“Akibat adanya tindak kejahatan , menimbulkan kerugian berupa biaya sosial ekonomi, Opportunity cost dan transfer payment”( dalam Masdiana, 2006) yaitu :

**a. Biaya sosial ekonomi**

Biaya ekonomi adalah biaya yang menimbulkan kerugian secara financial secara tunai bagi masyarakat, pelaku ekonomi, pemerintah dan semua pihak lain yang mencakup biaya perampasan, pengeluaran atas kerugian, biaya denda dan lain – lain. Biaya sosial merupakan kerugian yang diderita akibat tindak kriminal bukan secara materiil mupun tidak dapat dihitung dengan uang, seperti berupa status kriminal bagi pelaku, penderitaan fisik bagi korban dan lain sebagainya.

**b. Opportunity Cost**

Merupakan sejumlah pendapatan tetap yang hilang/dikorbankan selama menjalani masa hukuman akibat tindak kriminalitas yang dilakukan.

**c. Transfer Payments**

Adalah biaya transfer yang harus dikeluarkan akibat adanya kejahatan atau dalam mencegah kejahatan misalnya pembiayaan biaya keamanan sosial, biaya asuransi, biaya gugatan ke pengadilan dan lain–lain yang timbul sebagai akibat langsung dari adanya tindakan atau pencegahan kejahatan.

Secara teoretis, terdapat 3 pihak yang menanggung kerugian atas tindak kriminal, yaitu pihak pertama yakni korban, pihak kedua masyarakat luas dan pihak ketiga adalah ekonomi.

Pihak pertama yaitu korban adalah yang secara langsung mengalami kerugian atas tindak kriminal yang terjadi dan juga menanggung ketiga biaya tersebut diatas yaitu biaya sosial ekonomi, transfer payment dan opportunity cost.

Korban secara langsung menanggung biaya atas pencegahan kejahatan , menanggung biaya atas rasa takut ( *fear of crime* ) dan secara langsung menanggung kerugian secara fisik seperti hilang harta benda, penganiayaan atau kekerasan, biaya pengobatan, biaya kerusakan dan lain – lain.

Masyarakat sebagai pihak kedua meliputi segala proses yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan, proses penegakan hukum ,dan sistem keamanan bagi diri sendiri yang semuanya mengeluarkan biaya.

Menurut Durkhemian dalam Masdiana, (2006) “timbulnya suatu kejahatan dan korban ditentukan oleh lingkungan masyarakat. Masyarakat dan lingkungan yang aman dan tentram , disiplin serta sejahtera akan memproduksi polisi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya , masyarakat yang miskin dan vandalis justru akan menghasilkan polisi yang tidak efisien dan korup tidak berpihak pada masyarakat”.

Sedangkan pihak ketiga yaitu ekonomi. Tindak kriminal menimbulkan eksternalitas negatif yang mendistorsi ekonomi. Kota dengan tingkat kriminalitas yang tinggi akan menyebabkan para pelaku ekonomi, produsen maupun konsumen enggan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Setiap penambahan satu kejahatan akan berarti telah bertambah satu orang suburban ( orang pinggir kota ), Levitt (1996) dalam Ihdal (2007: 23)

Cullen dan Levitt (1999) dalam Ihdal (2007; 23) juga menambahkan bahwa “kejahatan menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan lokasi

tempat tinggal. Peningkatan kejahatan mengakibatkan adanya *urban fight* terutama bagi penduduk berpendidikan tinggi dan memiliki anak”.

## **5. Determinan Kriminalitas di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi**

### **a. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas**

Kebanyakan kejahatan terjadi di kalangan masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan rendah. Teori kejahatan rasional mengasumsikan bahwa masyarakat miskin memiliki ekspektasi (harapan) keuntungan yang lebih tinggi untuk melakukan kejahatan dengan mendapatkan pendapatan melalui sektor ilegal daripada sektor legal. Selain itu, *opportunity cost* yang dimiliki juga lebih kecil terutama bagi mereka yang tidak memiliki nilai yang tinggi dalam menghargai kebebasan diri dan tidak memiliki pekerjaan.

Menurut Freeman (1966) dalam Ihdal (2007; 27), terdapat hubungan yang positif antara kejahatan dengan kesenjangan sosial maka semakin besar kejahatan properti yang terjadi.

DeFronzo (1998) dalam Ihdal (2007: 28), “bahwa terdapat *Relative Deprivation Theory* yaitu seiring dengan penurunan kemiskinan terjadi juga pergeseran posisi relatif dalam distribusi pendapatan terutama pendapatan daerah sehingga mereka yang berada pada kelas pendapatan rendah akan cenderung melakukan kejahatann”.

Kelly (1999) dalam Choe (2000) mengatakan bahwa “pembunuhan, perampokan dan tindak kejahatan dengan kekerasan lainnya sangat erat

kaintannya dengan ketimpangan pendapatan di masyarakat “. Nillson (2004) dalam Choe ( 2000) juga menyebutkan bahwa “ terdapat hubungan yang erat antara segala bentuk tindak kejahatan dengan ketimpangan pendapatan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi “.

#### **b.Pengaruh Mobilitas Penduduk (Urbanisasi/Migrasi) Terhadap Kriminalitas**

Dalam National Commission of Law and Enforcement (1931; 23) menyebutkan bahwa “ arus migrasi bertanggung jawab penuh atas terjadinya tindak kriminal di masyarakat ( *wave of migration* ) , dimana arus migrasi menyebabkan perpindahan sekelompok masyarakat dari suatu daerah ke daerah tujuan migrasi tidak hanya perpindahan secara fisik saja tapi juga menyebabkan terjadinya transfer atau perpindahan tingkah laku dari masyarakat pendatang kepada masyarakat lokal”. Hal ini dapat berpengaruh positif ataupun negatif bagi masyarakat lokal. Negatif apabila tingkah laku yang ditularkan berujung pada kriminalitas.

Menurut Martinez and Lee ( 2000 ) dan Butcher and Piehl ( 2006 ) “ tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat berkaitan erat dengan tingkat migrasi”. Terdapat beberapa sebab akibat yang ditimbulkan oleh migrasi diantaranya level individual atau keluarga yang sebagian besar dipengaruhi oleh gender, usia, pendidikan dan tingkat kemiskinan, efek masyarakat sekitar atau lingkungan dan efek makro seperti kondisi pasar tenaga kerja, hukum dan pengaruh sosial seperti alkohol, obat terlarang, pertikaian/kerusuhan dan gang.

Saat korban yang potensial berada pada tempat dengan pelaku yang potensial keadaan tersebut akan menciptakan lingkungan yang dipenuhi tindak kriminal”.

Taft ( 1933) menambahkan “ tingkat migrasi yang tinggi merupakan salah satu faktor kriminogenik, termasuk didalamnya lingkungan sosial yang tidak terorganisasi dengan baik dapat menimbulkan tindak kriminal terjadi didalam lingkungan tersebut”.

Teori mengenai kriminalitas lain yang berkaitan dengan migrasi yaitu Sellin (1938 ) dalam National Commission of Law and Enforcement (1931) mengatakan “ konflik budaya yang ditimbulkan oleh para migran di daerah barunya justru malah menambah bahkan merubah norma – norma atau kebiasaan yang sudah ada di daerah tersebut sebelumnya”. Hal ini yang dapat memicu timbulnya penyimpangan – penyimpangan akibat dari perpindahan tingkah laku/moral kepada penduduk setempat yang mendatangkan tindak kriminal di daerah tersebut.

“Pada level agregat ,migrasi sangatlah mungkin dapat meningkatkan tindak kriminal dengan mulai merubah kebiasaan–kebiasaan penduduk setempat, menciptakan urbanisasi baru, serta menambah varietas kebiasaan yang sudah ada di daerah tersebut”, Sutherland (1924; 128 ) dalam *National Commission of Law and Enforcement* (1931).

Tingginya angka urbanisasi mencerminkan kepadatan penduduk di suatu daerah. Makin tinggi angka urbanisasi di suatu daerah maka berarti kepadatan penduduk juga semakin tinggi, karena urbanisasi yang terjadi akan menambah jumlah penduduk pada daerah tujuan urban terutama kota besar. Tingginya jumlah

penduduk di suatu daerah akan memancing timbulnya kriminalitas, baik dari sisi pelaku maupun dari sisi korban.

Kejahatan meningkat seiring dengan pertambahan populasi penduduk. Glaeser dan Sacerdote (1996) dalam Ihdal (2007) menemukan bahwa “kota besar dengan populasi minimal 250.000 jiwa memiliki tingkat kejahatan kekerasan yang lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan kota dengan populasi dibawah 10.000 jiwa. Elastisitas kejahatan terhadap populasi penduduk adalah 0.15 yang artinya peningkatan 10 % populasi penduduk akan meningkatkan 1.5 % kejahatan”. Menurutnya terdapat 3 alasan mengapa kejahatan banyak terjadi di kota besar.

*Pertama* lebih banyak harta rampasan yang bisa diperoleh di kota besar. *Kedua* adanya peluang tertangkap yang lebih kecil karena dalam kota besar yang padat tugas polisi lebih berat sehingga tidak mudah untuk menangkap pelaku ditengah kepadatan populasi. Dan *ketiga* kota besar memiliki potensi korban yang lebih besar karena rata – rata kepala keluarga adalah wanita , dimana pada kota besar para wanita kebanyakan tinggal sendiri tanpa adanya laki – laki di dalam rumah tersebut.

Antara urbanisasi dan kepadatan penduduk sangat erat kaitannya. Angka urbanisasi di suatu daerah dapat mencerminkan seberapa besar kepadatan penduduk pada setiap daerah dengan jumlah penduduk yang tinggi. Oleh sebab itu, angka urbanisasi dapat dijadikan acuan untuk mengukur seberapa tinggi jumlah populasi dan kepadatan penduduk di suatu daerah.

### c. Pengaruh Upah Terhadap Kriminalitas

Upah nominal atau sejumlah upah yang diterima oleh setiap tenaga kerja pada berbagai sektor mencerminkan seberapa mampu individu tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari disertai dengan seberapa mampu untuk menanggung tanggungan di dalam keluarga yang diukur oleh sejumlah pendapatan tersebut. Tinggi rendahnya upah yang diperoleh dapat menentukan pilihan-pilihan yang dipilih oleh individu tersebut untuk bertindak kriminal atau tidak. Selain itu, tinggi rendahnya upah yang diterima akan mengakibatkan individu tersebut tergolong miskin atau tidaknya. Karena kemiskinan sangat besar pengaruhnya terhadap kriminalitas.

Saat upah yang diterima oleh individu tinggi berarti individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan dikatakan tidak miskin maka individu tidak memilih untuk melakukan tindak kriminalitas. Hal sebaliknya, saat upah yang diperoleh rendah maka individu memilih untuk melakukan kriminalitas.

Fleisher ( 1966 ) dalam *World Bank and Latin America Studies* mengatakan bahwa “individu memutuskan untuk melakukan tindak kriminal akibat tingkat pendapatan yang rendah sehingga menyebabkan tendensi untuk melakukan tindak kriminal menjadi meningkat”.

DeFronzo (1998) dalam Ihdal (2007: 28), “bahwa terdapat *Relative Deprivation Theory* yaitu seiring dengan penurunan kemiskinan terjadi juga

pergeseran posisi relative dalam distribusi pendapatan terutama pendapatan daerah sehingga mereka yang berada pada kelas pendapatan rendah akan cenderung melakukan kejahatan”.

Berdasarkan uraian teori determinan tingkat kriminalitas diatas terlihat bahwa dari sisi pendekatan ekonomi, tingkat kriminalitas dilatar belakangi oleh motif ekonomi dan dapat secara jelas di deskripsikan bahwa antara tingkat kriminalitas dan variabel – variabel yang mempengaruhinya sangat berkaitan erat.

## **B. Penelitian terdahulu**

Tindak kejahatan atau kriminalitas merupakan salah satu masalah dalam masyarakat. Tingkat kriminalitas yang tinggi menyebabkan masyarakat tidak lagi msamiliki rasa aman dalam berkativitas terutama dalam menajalankan kegiatan ekonomi. Padahal rasa aman, tenang dan damai merupakan salaah satu kebutuhan manusia selain kebutuham pokok lainnya. Secara ekonomi. kriminalitas dapat menimbulkan kerugian – kerugian yang dapat menekan pembangunan. Seperti tingginya angka kriminalitas di suatu daerah akan menrunkan minat investor untuk berinvestati di Negara tersebut , para produsen juga enggan untuk berproduksi. Sehingga proses pembangunan yang direncanakan menjadi terhambat.

Terdapat banyak penelitian yang terkait dengan tindak kriminalitas yang terjadi di masyarakat dari sudut pandang ekononomi ( Perspektif ekonomi). Tidak hanya peneltian yang ada di Indonesia namun juga peneltian dari Negara-negara seperti America dan Eropa juga menjadi acuan bagi penelitian ini, dan juga terdapat beberapa kesaman dan perbedaan kajian dalam penelitian ini.

Adapun penelitian lain yang terkait dengan tindak kriminalitas dipandang dari pendekatan ekonomi seperti terlihat pada tabel berikut ini, dimana terdapat 2 penelitian terdahulu yang mengambil Indonesia sebagai daerah penelitian dengan menggunakan variabel yang hampir sama dengan penelitian ini.

Hasil yang diperoleh juga tidak jauh berbeda dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian yang dilakukan dengan daerah penelitian negara-negara America, Eropa dan Afrika juga menjadi acuan bagi penelitian ini. Penelitian terdahulu ditampilkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2. Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul penelitian	Var. dependent	Var. independent	Hasil penelitian
1	Florentinus Nugro H.	Faktor -faktor yang mempengaruhi tindak kriminalitas di Indonesia	Property crime  Jumlah terdakwa pidana	Terdakwa yg dihukum Upah Pengeluaran pemerintah Terdakwa yg dihukum Upah Pengeluaran pemerintah	Positif – Signifikan Negatif – Signifikan Positif – Signifikan Positif - Tidak signifikan Positif - Tidak signifikan Positif – Signifikan
2	Doyle ,Ahmed and Horn	Pengaruh kondisi pasar tenaga kerja terhadap kejahatan kota	Jumlah kejahatan property	Salary ( upah ) Gini Tingkat penyelesaian polisi Proporsi usia pria ( 15 -39 )	Positif – Signifikan Positif - Tidak signifikan Negatif – Signifikan Positif – Signifikan
3	World bank and Latin America Studies	Determinant of crime rate in America Latin	Crime rate	Education Criminal Experience Crime in society Economic growth Income Inequality Police and justice system Other factor	Positif – Signifikan Positif - Tidak signifikan Positif - Tidak signifikan Positif - Signifikan Positif – Signifikan Negatif – Signifikan Positif - Tidak signifikan
4	PABLO FAJNZYLBER, DANIEL LEDERMAN and NORMAN LOAYZA	Crime and Income Inequality in America , Europe , Africa and Asia	Crime Rate	Income inequality Urbanization Economic growth Education Average Income Population	Positif – Signifikan Negatif – Signifikan Positif - Signifikan Negatif – Signifikan Negatif – Signifikan
5	Ihdal Husnayain	Analisis ekonomi kejahatan property di Indonesia	Kejahatan property	Pendapatan Koefisien gini Proporsi usia produktif Pengangguran Kekuatan polisi Tingkat penyelesaian kasus	Positif – Signifikan Negatif – Signifikan Positif – Signifikan Positif - Tidak signifikan Negatif - Tidak Signifikan Positif - Tidak signifikan

### **C. Kerangka konseptual**

Kerangka konseptual digunakan untuk mengetahui dan menguraikan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau kaitan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Dengan ruang lingkup penelitian 31 dari 33 propinsi di Indonesia

Berdasarkan uraian teori kriminalitas diatas, dapat diketahui bahwa masing-masing variabel yakni ketimpangan pendapatan (gini), urbanisasi dan upah nominal sebagai variabel bebas mempengaruhi kriminalitas sebagai variabel terikat.

Distribusi pendapatan berkaitan dengan ketimpangan yang terjadi disuatu daerah. Rasio gini dihitung berdasarkan merata atau tidaknya distribusi pendapatan dan seberapa banyak masyarakat yang menikmati hasil pembangunan di daerahnya. Tidak ubahnya seperti kemiskinan, ketimpangan yang terjadi di masyarakat juga berakibat sama dengan kemiskinan. Saat ketimpangan di suatu daerah hampir mendekati 1 maka berarti rata-rata masyarakatnya adalah miskin. Sebagian besar pendapatan dikuasai oleh beberapa pihak sehingga terjadi ketidakmerataan.

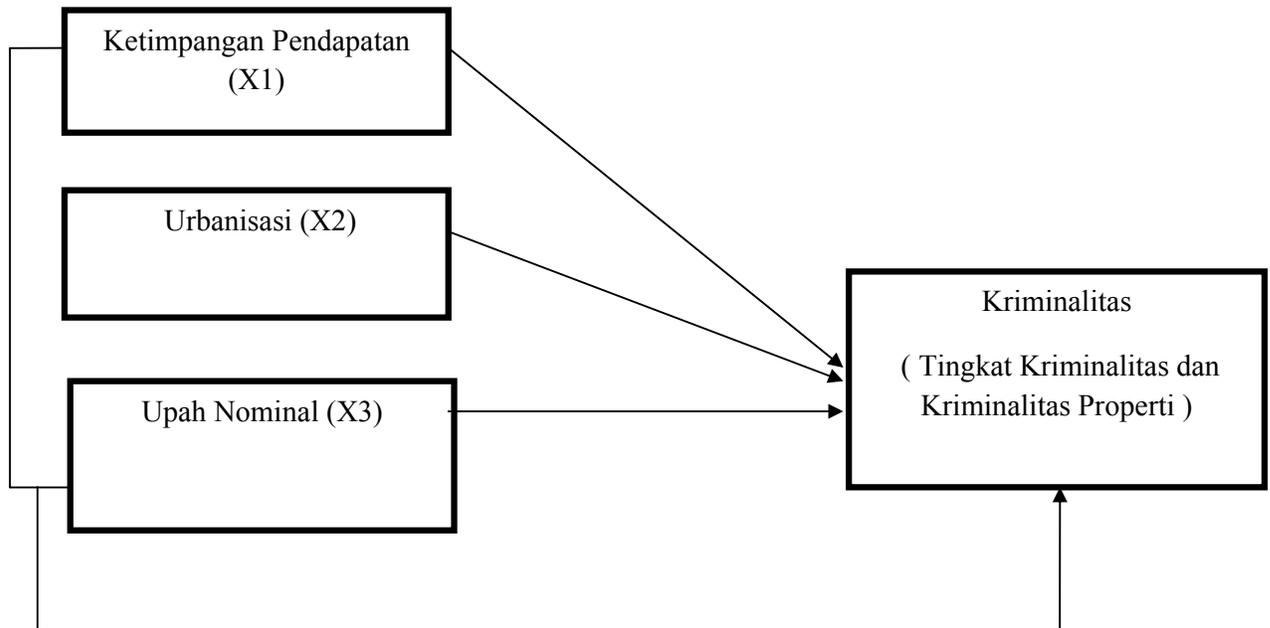
Berpijak pada kondisi ini, memaksas sebagian masyarakat yang tidak sejahtera melakukan tindak kriminalitas untuk dapat memperoleh hak yang sama namun dengan cara yang tidak sehat. Ini memaksa berbagai tindak kejahatan muncul di masyarakat sehingga antara rasio gini terhadap tingkat kriminalitas saling mempengaruhi secara positif signifikan.

Migrasi-urbanisasi secara tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya tindak kriminal di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masuknya sekelompok individu ke suatu lingkungan yang baru dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat di lingkungan tersebut. Dapat berpengaruh positif maupun negatif. Berpengaruh positif saat pengaruh yang ditularkan dapat membawa dampak yang baik bagi lingkungan tersebut. Namun dapat berpengaruh negative saat pengaruh yang ditularkan berdampak buruk bagi lingkungan tersebut seperti pengaruh untuk bertindak kriminal di masyarakat. Maka urbanisasi memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap tingkat kriminalitas.

Upah menggambarkan tingkat pendapatan yang diterima seseorang. Tinggi rendahnya upah menunjukkan tinggi atau rendahnya pendapatan. Semakin tinggi upah maka semakin tinggi pendapatan yang diterima sehingga semakin sejahtera seorang individu maka resiko untuk bertindak kriminal juga semakin rendah. Sebaliknya semakin rendah upah semakin rendah pendapatan maka resiko untuk bertindak kriminal menjadi semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa upah mempengaruhi tingkat kriminalitas secara negatif dan signifikan.

Dari uraian korelasi variabel independent terhadap variabel dependent diatas, untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dengan kerangka konseptual berikut ini :

**Gambar 2. Kerangka Konseptual**



#### **D. Hipotesis Penelitian**

1. Ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kriminalitas di Indonesia yang meliputi indikator tingkat kriminalitas dan kriminalitas properti di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Urbanisasi pendapatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kriminalitas di Indonesia yang meliputi indikator tingkat kriminalitas dan kriminalitas properti di Indonesia.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Upah nominal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kriminalitas di Indonesia yang meliputi indikator tingkat kriminalitas dan kriminalitas properti di Indonesia.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Ketimpangan pendapatan, urbanisasi dan upah nominal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia yang meliputi indikator tingkat kriminalitas dan kriminalitas properti di Indonesia .

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu } \beta \neq 0$$

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan analisis regresi panel dan pembahasan terhadap hasil penelitian, antara variabel bebas: ketimpangan pendapatan, urbanisasi dan upah terhadap variabel terikat yakni kriminalitas di Indonesia baik secara parsial maupun secara bersama-sama, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh antara ketimpangan pendapatan (gini) terhadap tingkat kriminalitas (*Crime rate*) ditemukan hasil bahwa ketimpangan pendapatan dengan indikator koefisien gini memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap tingkat kriminalitas (*Crime rate*) di Indonesia dalam runtun waktu 2007-2010. Kemudian, ketimpangan pendapatan (gini) tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kriminalitas properti (*Property crime*).
2. Penelitian menunjukkan hasil urbanisasi memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap tingkat kriminalitas (*Crime rate*). Artinya setiap peningkatan satu persen urbanisasi akan meningkatkan tingkat kriminalitas sebesar 0,015 persen. Dalam indikator kriminalitas properti menemukan hasil bahwa urbanisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kriminalitas properti. Dimana setiap peningkatan urbanisasi akan ikut serta meningkatkan tingkat kriminalitas property sebesar 0,003 persen.

Hasil ini menjelaskan bahwa peningkatan arus urbanisasi akan mengakibatkan kepadatan penduduk dengan populasi penduduk yang tinggi sehingga dapat menyebabkan kemiskinan yang berujung pada tindak kriminalitas di masyarakat.

3. Temuan penelitian untuk pengaruh upah terhadap tingkat kriminalitas adalah tidak signifikan dan negatif. Dimana setiap peningkatan upah mampu mengurangi tingkat kriminalitas sebesar 1,90 persen. Untuk analisis kriminalitas properti menunjukkan hasil yang signifikan negatif dengan koefisien regresi sebesar - 0,607. Ini artinya setiap peningkatan upah sebesar satu persen akan meningkatkan tingkat kriminalitas properti (*Property crime*) sebesar 0,607 persen. Dapat disimpulkan bahwa upah berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia.

Berdasarkan hasil perhitungan estimasi regresi panel diatas dapat dilihat bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara ketimpangan pendapatan (gini), urbanisasi dan upah terhadap kriminalitas di Indonesia dalam runtun waktu 2007-2010.

## **B. Saran**

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan dari hasil penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah mampu mengambil kebijakan yang adil merata terhadap seluruh kalangan masyarakat di Indonesia dalam peningkatan pendidikan. Terutama bagi masyarakat miskin yang sangat kurang dalam pendidikan. Rata-rata masyarakat miskin tidak berpendidikan sehingga mereka sangat dekat dengan tindak kejahatan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan yang tepat sasaran dalam APBN dan APBD untuk meningkatkan pendidikan bagi seluruh kalangan masyarakat tanpa pengecualian agar seluruh masyarakat dapat menikmati bangku pendidikan demi tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral.
2. Dilihat dari sisi pendapatan daerah, PDRB perkapita yang berkaitan langsung dengan pendapatan tenaga kerja yang juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, diharapkan pemanfaatannya benar-benar sesuai dengan tujuan awal yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan menggali segala potensi daerah yang ada dan mengembangkan sektor-sektor unggulan untuk memajukan perekonomian daerah melalui program pembangunan di setiap daerah dan mengalokasikan setiap hasil pendapatan daerah tersebut seperti peningkatan layanan public kesehatan, pendidikan, ekonomi mandiri, revitalisasi pertanian , transportasi dan meningkatkan upah tenaga kerja agar tercapai kesejahteraan masyarakat dan terhindar dari tindak kejahatan.
3. Untuk permasalahan kependudukan seperti urbanisasi, kemiskinan dan ketimpangan diperlukan kebijakan tersendiri yang berkaitan langsung dengan masalah kependudukan. Diharapkan pemerintah dan pihak terkait serta masyarakat sendiri untuk turut berpartisipasi dalam menjalankan kebijakan pemerintah dalam menangani masalah kependudukan. Melalui kebijakan dalam

menekan laju pertumbuhan penduduk dan menekan arus urbanisasi maupun migrasi dengan pembatasan penduduk yang masuk ke daerah perkotaan dan daerah lain untuk tidak menetap dalam jangka waktu yang lama untuk menghindari ledakan penduduk dan munculnya masalah kemiskinan. Serta diperlukan pemerataan pembangunan di setiap daerah terutama pedesaan sehingga pemerataan pendapatan dapat terdistribusi baik sesuai tujuan. Pembangunan daerah pedesaan seperti pembangunan pertanian, fasilitas publik bagi masyarakat desa (pendidikan dan kesehatan ) dan infrastruktur desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa yang mandiri. Tercapai kebijakan tersebut dapat turut membantu dalam mengatasi masalah kependudukan dan masalah kriminalitas yang terjadi di perkotaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik . 2011. Statistik Kriminal Indonesia : Jakarta.*
- Badan Pusat Statistik. 2007. Statistik Indonesia : Jakarta.*
- Badan Pusat Statistik. 2008. Statistik Indonesia : Jakarta.*
- Badan Pusat Statistik. 2009. Statistik Indonesia : Jakarta.*
- Badan Pusat Statistik. 2010. Statistik Indonesia : Jakarta.*
- Badan Pusat Statistik. 2011. Statistik Indonesia : Jakarta.*
- Badan Pusat Statistik. 2011. Statistik Kriminal Indonesia : Jakarta.*
- Becker, Gary S. 1968. "Crime and Punishment: An Economic Approach", The Journal of Political Economy, University of Chicago, USA.*
- Butcher. Piehl. 2006. "Immigration and Crime".NBER Working paper : Cambridge, America.*
- Choe , Jongmook. 2008. " Income Inequality and Crime in the United States". Economics Letters : Washington D.C.*
- DeFronzo, James. 1998. " Welfare and property Crime". Journal of Justice Quaterly Volume 15 number 2 : United States.*
- Dills, K. Angela. 2008. " What do Economics Know About Crime ". NBER Working Paper ; Cambridge, America.*
- Edward, Mary. "Regional and Urban Economics and Development – Theory and Methods. Aurbach Publications : Jakarta*
- Elgar, Edward. " Economics Uncut : A Complete Guide to Life , Death and Misadventure. Adjunct Lecturer in Economics, Florida State University and Visiting Lecturer in Economics, State University of New York at Buffalo and University of Colorado at Denver, USA.*